



Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia is licensed under
A Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

KERJASAMA PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA WISATA PANTAI GONDA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Muh Kasim^{1*)}, Muh Yahya²⁾, Masri Ridwan³⁾, L.M. Ruspan Takasi⁴⁾, Eko Harianto⁵⁾, La Ode Nursalam⁶⁾, Andri Estining Sejati⁷⁾

¹⁾Politeknik Pariwisata Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

E-mail: kasdam1504@gmail.com*

²⁾Politeknik Pariwisata Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

E-mail: yahyaakil@ymail.com

³⁾Politeknik Pariwisata Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

E-mail: masriridwan@poltekiparmakassar.ac.id

⁴⁾Universitas Terbuka kendari, Kendari, Indonesia

E-mail: ruspan.takasi@gmail.com

⁵⁾Universitas Terbuka Kendari, Kendari, Indonesia

E-mail: ehariantoe4@gmail.com

⁶⁾Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

E-mail: laodenursalam77@gmail.com

⁷⁾Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka, Indonesia

E-mail: anes.um36@gmail.com

Abstract. The research aimed to find out how government cooperation increases human resources working in tourist destinations and to recommend the concept of cooperation at Gonda Beach, Polewali Mandar Regency. Research with a qualitative approach. The research subjects were officials in the Department of Tourism, the Office of Education, and the English Course Institute in Polewali Mandar Regency. Data collection through interviews and documentation. The data analysis technique uses descriptive qualitative, which examines research data with collaborative governance: initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative processes. The study results show that the variables of initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaboration processes have never been formed or decided by the Government in Polewali Mandar Regency. Cooperation between government and private agencies to improve the competence of human resources for tourism actors at Gonda Beach, Polewali Mandar Regency, could have gone better. The government is waiting for the program from the local government and preparing training participants.

Keywords: government; cooperation; human resources, beach tourism

Abstrak. Tujuan penulisan untuk mengetahui bagaimana kerjasama pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang bekerja di daerah tujuan wisata dan merekomendasikan konsep kerjasama di Pantai Gonda Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah pejabat di lingkungan Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Lembaga Kursus Bahasa Inggris di Kabupaten Polewali Mandar. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yang mengkaji data penelitian dengan *collaborative governance*, yaitu: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan variabel kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi tidak pernah dibentuk atau diputuskan oleh Pemerintah di Kabupaten Polewali Mandar. Kerjasama antar instansi baik pemerintahan maupun swasta dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaku wisata di Pantai Gonda Kabupaten Polewali Mandar belum berjalan dengan baik. Pemerintah menunggu program dari pemerintahan di asanya saja dan mempersiapkan peserta pelatihan

Kata kunci: pemerintah; kerjasama; sumber daya manusia, wisata pantai

Pendahuluan

Pengembangan obyek wisata sangat terkait dengan pelestarian nilai kepribadian dan pengembangan budaya bangsa melalui memanfaatkan segala potensi baik keindahan maupun kekayaan alam. Pemanfaatan dalam hal pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian potensi yang dipadukan dalam bentuk daya tarik wisata. Pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata daerah dikelola oleh masing-masing daerah. Sektor pariwisata dapat berkembang karena tersedianya berbagai potensi wisata dan juga dukungan pemerintahan setempat melalui regulasi (Ismail, 2020). Pengelolaan obyek-obyek wisata di suatu kawasan hendaknya dikelola dengan baik (Amaluddin, Sejati, Ihsan, & Mutiana, 2019).

Perkembangan suatu daya tarik wisata terkait keputusan wisatawan untuk berkunjung karena adanya daya tarik yang ada di dalam objek wisata tersebut. Keputusan untuk mengunjungi objek wisata berkaitan erat dengan perilaku wisatawan. Harga, lokasi, dan fasilitas memiliki pengaruh keputusan berkunjung wisatawan, menyarankan agar Dinas Pariwisata harus memperhatikan aspek perilaku konsumen khususnya pengambilan keputusan berwisata (Saputra, Yuliana, & Ferdian, 2021). Wisatawan memiliki kecenderungan mengunjungi suatu objek wisata dipengaruhi biaya operasional, jarak lokasi, dan kelengkapan fasilitas di objek wisata tersebut (Suryana, 2018). Pemerintah perlu mempertimbangkan aspek ini, sehingga wisatawan yang berkunjung semakin banyak.

Pengembangan pariwisata tidak lepas dari pengelolaan pemerintah. Upaya mencapai pembangunan perlu berdasarkan potensi daerah, pola kerjasama yang baik dan sistematis dari berbagai sektor. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 pada pasal 51-52 tentang Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Peraturan tersebut menjelaskan untuk mencapai pembangunan pariwisata, kekuatan terbesar yang harus diterapkan adalah terciptanya suatu bentuk skema kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah lokal, dunia usaha dunia industri, dan masyarakat (Umar, Burhanuddin, & Nasrulhaq, 2019). Pemerintah melakukan kerjasama dan sinergi antara pemerintah dengan pihak swasta terutama dengan masyarakat sebagai inti utama pariwisata yang secara tidak langsung menerima dampak dari pariwisata berkembang menjadi berkelanjutan (Sumarmi, Arinta, Suprianto, & Aliman, 2021).

Upaya menjalankan pemerintahan dalam tugas pokok dan fungsi, seringkali pemerintah sering berjalan beriringan dengan bergotong royong dengan pihak lain untuk mencapai target program pemerintah yang ingin dicapai. Kolaborasi yang dibangun antara pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat, misalnya, merupakan bentuk kerjasama kepedulian pemerintah terhadap segala bentuk kegiatan masyarakat untuk mendukung perekonomian masyarakat menuju masyarakat yang mandiri dan kreatif (Nopriono & Suswanta, 2019). Kerjasama dari satu atau lebih instansi terkait dapat dikelola dengan melibatkan langsung pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan formal, pelaksanaan kebijakan, serta pengelolaan rencana pemerintah.



Konsep *governance* yang mengedepankan prinsip kerjasama dan menjelaskan fenomena kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan adalah *collaborative governance* (Zaenuri, 2021). Di dalam kondisi penting dapat terjadi kerjasama antara publik dan swasta yang menciptakan produk hukum, aturan, dan kebijakan untuk administrasi publik (Ansell & Gash, 2008). Tata Kelola Kolaboratif didefinisikan sebagai proses dan struktur pengambilan keputusan dan pengelolaan kebijakan yang melibatkan masyarakat secara konstruktif pada batas-batas lembaga publik, tingkat pemerintahan, masyarakat, swasta, dan sipil untuk melaksanakan berbagai kepentingan publik yang tidak dapat dibuat jika dilakukan dengan satu pihak (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012)

Konsep *collaborative governance* adalah suatu proses yang bersifat transformatif. Proses transformasi kolaboratif dimulai dari kerjasama antara pemerintah dengan *stakeholders* lainnya yang bersifat perintah. Tahap ini pemerintah memiliki kontrol kuat, *stakeholders* lainnya tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Koordinasi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan lainnya terjadi dalam proses pengambilan keputusan bersama, kemudian hubungan kolektif meningkat menjadi hubungan kerjasama. Hubungan kerjasama terjalin untuk berbagi ide dan sumber daya untuk mendapatkan keuntungan bersama. Tahap terakhir dalam bentuk hubungan kolaboratif dan telah terjadi sampai pada tahap berbagi kreasi dalam bentuk institusi yang bersifat permanen dan otonom (Shergold, 2008)

Pemerintah harus bekerjasama dengan masyarakat mengenai pengembangan dan peningkatan suatu daya tarik wisata. Di dalam pengembangan suatu daya tarik wisata memerlukan proses panjang dan perlu adanya koordinasi dengan pemerintah. Pemerintah sebagai fasilitator, dimana pemerintah membantu pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) (Rifa'i, 2021). Masyarakat akan mengembangkan dan mengelola objek wisata berupa penyediaan fasilitas, atraksi, dan kemudahan bagi wisatawan yang berkunjung (Fitriana, Tarunajaya, & Akbar, 2021). Secara tidak langsung masyarakat mendapat dampak langsung dari segi perekonomian. Kerjasama ini akan berhasil jika pemerintah dan masyarakat saling berkoordinasi.

Upaya pemulihan dan menghidupkan kembali pariwisata di Indonesia serta mengembalikan kepercayaan wisatawan untuk berwisata di era adaptasi kebiasaan baru Kemenparekraf mengeluarkan program dan pedoman yaitu Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan *Environmental Sustainability Protocol* atau *Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability* (CHSE). Program khusus di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang umumnya ditujukan kepada pengusaha atau pengelola, pemandu wisata setempat, pegawai objek wisata dan wisatawan (Anggarini, 2021). Bagi daya tarik wisata dan wisatawan, protokol ini dapat diterapkan sebagai jaminan dan pedoman dalam menyediakan produk dan layanan yang bersih, sehat, aman, dan ramah lingkungan serta bepergian dengan aman selama masa adaptasi baru atau normal baru.



Upaya melaksanakan program pengembangan pariwisata yang mengalami kendala akibat masa adaptasi baru, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar juga perlu menerapkan protokol kesehatan yang profesional, sehingga dapat tercapai keselamatan bagi pengunjung untuk meningkatkan pariwisata daerah dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya wisata. Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu Daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Tipografi Kabupaten Polewali Mandar terdiri atas dataran tinggi dan dataran rendah termasuk pegunungan Lompobattang. Bagian utara memiliki lahan berbukit dan bergunung yang berpotensi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Bagian selatan memiliki dataran rendah yang berpotensi untuk pengembangan wisata pantai.

Kabupaten Polewali Mandar berjarak 225 km dari Kota Makassar. Berdasarkan letak geografis yang sangat strategis sangat berpotensi untuk dikunjungi wisatawan, dan potensi penyebaran virus juga sangat potensial, sehingga sangat diperlukan penerapan protokol kesehatan di setiap objek wisata yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Kabupaten Polewali Mandar memiliki dua Event Internasional yaitu *Polewali Mandar International Folk and Art Festival (PIFAF)* dan *Sandeq Race*. Sumber daya manusia harus diberikan motivasi yang tinggi untuk meningkatkan bahasa Inggris mereka yang bekerja di tujuan terbaik, dan juga Polewali Mandar memiliki beberapa wisata alam, yang terdiri dari Wisata Alam air terjun tiga lantai, bendungan irigasi Sekka-Sekk ayang juga merupakan objek wisata Tirta untuk mandi, olahraga air, memancing dan rekreasi.

Kabupaten Polewali Mandar juga memiliki pantai yang sangat panjang, mulai dari memasuki perbatasan Kabupaten Pinrang hingga perbatasan Kabupaten Majene terdapat deretan pantai yang sangat indah dan menjanjikan. Hal ini terlihat dari beberapa destinasi wisata pantai dan pulau, seperti: Pulau Gusung Toraja, Pulau To Salama, Pantai Benuang, Pantai Mappie, Pantai Gonda, Pantai Palippis, dan masih banyak lagi yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pengelolaan kolaboratif selama masa adaptasi baru ini. Jika tidak ditangani sesuai dengan kebijakan pemerintah, maka akan terjadi kerusakan sehingga akan terjadi penurunan pengunjung. Sumber daya manusia yang bekerja di daerah tujuan wisata juga harus diperhatikan terutama untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris (Suryana, 2018).

Pengembangan dan peningkatan objek dan daya tarik wisata tidak lepas dari peran pemerintah dan masyarakat. Kabupaten Polewali Mandar yang saat ini sedang mengintensifkan pariwisata dengan mengembangkan dan meningkatkan daya tarik wisata. Adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat maka pembangunan akan berjalan secara optimal dan terstruktur. Kawasan ekowisata pantai Gonda merupakan kawasan strategis yang terletak di pesisir pantai Gonda kecamatan Campalagian sebagai penghasil berbagai jenis ikan yang menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat setempat dan pemandangan laut menjadi daya tarik yang lebih menarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Gonda. Pantai. Di dalam lingkup pemerintah, ada program-program yang telah disepakati dengan semua instansi dengan

masyarakat. Pokok permasalahannya adalah program-program yang telah dilaksanakan sudah terealisasi atau masih dalam perencanaan.

Collaborative governance menjadi acuan dan pedoman pengetahuan kompetensi bahasa Inggris pegawai di Ekowisata Gonda dengan tujuan untuk mengetahui peran pemerintah sebagai lembaga publik dan peran masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan pengetahuan kompetensi bahasa Inggris pegawai di Tempat Wisata Ekowisata Gonda di Kabupaten Polewali Mandar. Bentuk kerjasama yang dilakukan berupa kerjasama dan sinergi sehingga berdampak berganda di segala aspek khususnya bahasa Inggris pariwisata. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kerjasama pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia pada wisata Pantai Gonda di kabupaten Polewali Mandar.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan acuan (Moleong, 2016). Lokasi penelitian di Pantai Gonda Kecamatan Campalagian Kabupaten, Polewali Mandar Sulawesi Barat. Penelitian ini dimulai pada bulan Maret hingga Agustus 2022 dari tahap pra survei hingga penelitian tindakan. Subyek penelitian ini adalah Kepala/Staf Dinas Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar yang berkompeten di bidang pariwisata dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Campalagian.

Data dalam penelitian ini terdiri atas primer dan sekunder. Data Primer didapatkan langsung dari lapangan. Data sekunder dikumpulkan dari sumber secara tidak langsung (HL, Nasruddin, & Sejati, 2022). Data sekunder diperoleh dari pustaka dan dokumen terkait penelitian. Indikator kerjasama pemerintah dalam upaya peningkatan sumberdaya pariwisata Pantai Gonda terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Indikator Kerjasama pengembangan SDM Wisata Pantai Gonda

No	Indikator	Poin Pertanyaan
1	Kondisi Awal	a. Ketidakseimbangan sumberdaya dan pengetahuan antara kolaborator b. Insentif untuk kolaborasi c. Konflik dalam kolaborasi
2	Desain Lembaga	Belum ditentukan karena belum terbentuk
3	Kepemimpinan Fasilitas	Negosiasi untuk mencegah masalah
4	Proses Kolaborasi	a. Membangun kepercayaan antar peserta kolaborasi. b. Komitmen dalam proses kolaborasi. c. Misi, masalah yang dihadapi, dan nilai Bersama dalam kolaborasi d. Hasil antara dan hasil akhir kolaborasi

Sumber: Ansell & Gash (2008)

Penelitian ini menggunakan tiga cara pengumpulan data. Pertama, observasi dengan pengamatan yang dipandu catatan keadaan atau tingkah laku subjek dan objek penelitian. Peneliti melakukan observasi langsung ke objek penelitian untuk mengetahui perkembangan dan pengelolaan data masing-masing objek wisata.

Kedua, wawancara menggali data untuk mendapatkan informasi dari subjek penelitian. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi

terstruktur yang termasuk wawancara mendalam. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber terkait objek wisata seperti melakukan wawancara dengan Dinas Pariwisata mengenai kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan kompetensi bahasa Inggris di destinasi wisata. Ketiga, dokumentasi dalam bentuk dokumen terkait penelitian.

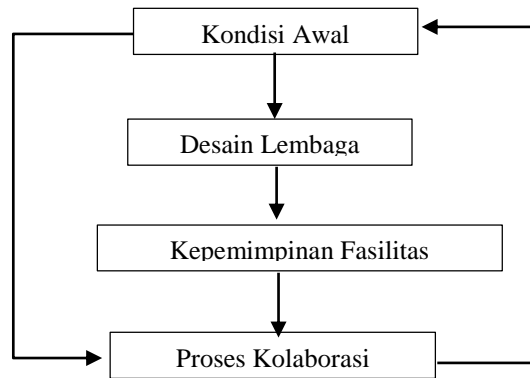
Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif Miles dan Huberman, pertama reduksi data (*data reduction*); kedua tampilan data (*data display*); dan ketiga menarik kesimpulan. Reduksi data berbentuk narasi deskriptif kualitatif, meskipun ada dokumen data kuantitatif yang juga bersifat deskriptif. Deskripsi dengan kualitatif naratif, mencari persamaan dan perbedaan informasi. Reduksi data berarti data disederhanakan, dipilih yang penting, dan diabstraksikan.

Presentasi data berisi kumpulan informasi terstruktur untuk menarik kesimpulan. Penyajian data kualitatif yang paling sering digunakan di masa lalu adalah dalam bentuk narasi. Teks tersebar, bagian demi bagian daripada secara bersamaan, strukturnya buruk, dan sangat berlebihan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian, bagan, hubungan antar kategori, dan *flowchart*. Presentasi data memudahkan memahami fenomena dan merencanakan tahap ketiga.

Langkah ketiga penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih tentatif dapat berubah. Kesimpulan yang kredibel didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten. Kesimpulan adalah inti dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat terbaru berdasarkan uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Kesimpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang telah ditafsirkan dan dibahas.

Hasil

Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan selaku kepala bidang promosi bahwa di Kabupaten Polewali Mandar kerjasama antar dinas masih sebatas internal khususnya di bidang pariwisata, artinya belum ada kerjasama dengan pihak luar seperti dinas pendidikan dan lembaga kursus, tetapi hanya tujuan wisata yang selalu memiliki hubungan dengan dinas pariwisata. Ansell dan Gash mengklasifikasikan model kolaborasi memiliki empat variabel yang menjadi fokus perhatian, yaitu: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Diagram variabel kerjasama sebagai berikut.



Gambar 1. Diagram Variabel *Collaborative Governance*

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Polewali Mandar, peran pemerintah menjadi kunci utama. Bagaimana peran pemerintah dalam membangun daerah akan berdampak pada kemajuan daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini dengan menerapkan *collaborative governance* mampu mengembangkan sektor pariwisata. Hasil penelitian dapat digambarkan bahwa kondisi objek wisata Pantai Gonda masih perlu mendapat perhatian yang sangat serius dari berbagai pihak yang berkepentingan, karena fasilitas yang sangat kurang aksesibilitasnya dan masih dalam tahap penimbunan, agar kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung belum diterima.

Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan Kepala Seksi Promosi Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Polewali Mandar, bahwa kerjasama antar instansi yang terkait dengan pengembangan SDM pariwisata belum terjalin dengan baik, antara lain antara Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan, namun dalam menangani narasumber yang memiliki kompetensi komunikasi dengan wisatawan luar Negeri, pihak dinas pariwisata langsung membuka penawaran secara terbuka pada saat diperkirakan akan kedatangan tamu asing dalam jumlah besar, seperti pada saat wisatawan mancanegara pada acara seperti FIPAP. Festival ini merupakan kegiatan yang diadakan setiap tahun dan diikuti oleh beberapa negara, tujuannya untuk memperkenalkan budaya.

Pemerintah juga telah menjalin kerja sama dengan instansi terkait dalam pengembangan kemampuan sumber daya manusia melalui *upgrade* komunikasi dengan wisatawan luar Negeri, seperti keikutsertaan narasumber pariwisata jika ada kegiatan pelatihan pengembangan. Misalnya, jika ada permintaan dari peserta Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat untuk mengirimkan petugas destinasi kegiatan pelatihan terkait pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui *upgrade* komunikasi dengan wisatawan luar Negeri, dinas pariwisata kabupaten Polewali Mandar segera menginformasikan destinasi untuk menunjuk karyawannya untuk mengikuti pelatihan, sehingga kerjasama masih bersifat internal di Dinas Pariwisata setempat.

Dinas Pendidikan berperan dalam memajukan kompetensi sumber daya manusia, karena dinas ini mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan sekolah yang ada di suatu daerah, baik SMA maupun SMK, bahkan perijinan pendirian semua lembaga kursus yang didirikan di suatu daerah harus melalui kantor pendidikan. Dinas pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia karena dapat menentukan kebijakan dalam hal proses kegiatan pendidikan. Misalnya,

bagaimana upaya pemerintah dalam memprioritaskan kegiatan peningkatan kompetensi komunikasi dengan wisatawan luar Negeri bagi SDM di SMA. Menurut Lembaga Kursus di Desa Kanang, jumlah peserta pelatihan *upgrade* komunikasi dengan wisatawan luar Negeri meningkat selama liburan bulan puasa. Sedangkan beberapa tahun terakhir libur pada bulan puasa terbilang sedikit, sehingga jumlah peserta pelatihan terbilang cukup banyak.

Selama Pandemi Covid 19, kegiatan kursus ditutup total. Upaya mendukung rencana lembaga kursus ini, sangat diperlukan dukungan dari dinas pendidikan setempat, agar generasi muda yang memiliki bakat untuk mengembangkan diri dalam meningkatkan kompetensi komunikasi dengan wisatawan luar Negeri dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya. Generasi muda memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya. Lembaga kursus yang telah berdiri dapat dikembangkan lebih lanjut di masa yang akan datang agar generasi muda yang memiliki bakat untuk mengembangkan diri dalam meningkatkan kompetensi bahasa Inggris dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya. Generasi muda memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya.

Lembaga kursus yang telah berdiri dapat dikembangkan lebih lanjut di masa yang akan datang supaya generasi muda yang memiliki bakat untuk mengembangkan diri dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui bahasa Inggris dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya. Generasi muda memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya. Lembaga kursus yang telah berdiri dapat dikembangkan lebih lanjut di masa yang akan datang.

Hasil wawancara dengan Dinas Pariwisata bahwa kerjasama dengan pengelola destinasi sudah terjalin dengan baik, dinas pariwisata langsung menghubungi pengelola destinasi wisata jika ada permintaan peserta pelatihan sumber daya manusia melalui *upgrade* komunikasi dengan wisatawan luar Negeri jika ada permintaan dari dinas pariwisata Provinsi Sulawesi Barat. Tidak ada kerjasama dengan lembaga kursus dan masyarakat setempat yang ingin meningkatkan kompetensi komunikasi dengan wisatawan luar Negeri, mereka langsung menghubungi lembaga kursus tersebut jika masyarakat ingin meningkatkan kompetensinya tanpa ada rekomendasi dari dinas pariwisata setempat dan juga Dinas Pendidikan belum menjalin kerjasama dengan dinas pariwisata dalam peningkatan kompetensi sumberdaya pariwisata di Kabupaten Polwali Mandar.

Dinas Pendidikan berperan dalam menentukan kebijakan terkait penyelenggaraan kegiatan pelatihan komunikasi dengan wisatawan luar Negeri di SMA dan SMK, guna meningkatkan minat dan kompetensi komunikasi dengan wisatawan luar Negeri bagi pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Polewali Mandar. Upaya menjadi narasumber pariwisata yang akan bekerja di bidang pariwisata, maka pelaksanaan pembelajaran komunikasi dengan wisatawan luar Negeri di sekolah akan terselenggara dengan baik jika ada kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat, karena pihak inilah yang menentukan teknis pelaksanaan pendidikan di masing-masing sekolah.

Hasil wawancara dengan lembaga kursus *upgrade* komunikasi dengan wisatawan luar Negeri di Desa Kanang mengatakan, pihaknya belum menjalin kerjasama dalam pengelolaan tempat pelatihan dengan pemerintahan, hanya pada saat izin pendirian harus mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan, dan selanjutnya pembinaan dan pelatihan dilakukan oleh jurusan yang bersangkutan. Dalam dua tahun terakhir Lembaga Pelatihan *upgrade* komunikasi dengan wisatawan luar Negeri tidak dapat dilaksanakan karena terkendala dengan pembatasan kegiatan, akibat pandemi Covid 19. Sehingga aktivitasnya terhenti total.

Rencana pembukaan pusat pelatihan komunikasi dengan wisatawan luar Negeri ini akan membantu sumber daya manusia pariwisata di kabupaten Polewali Mandar untuk meningkatkan kompetensinya. Keunggulan lembaga ini dibanding tempat kursus reguler adalah peserta diharuskan tinggal bersama peserta lain sesuai paket yang telah dipilih pada saat pendaftaran. Selama berada di lokasi pelatihan para peserta harus berkomunikasi seakan dengan wisatawan luar Negeri.

Berdasarkan hasil observasi di lokasi penelitian pantai Gonda sebagai salah satu objek wisata unggulan di Kabupaten Polewali Mandar dan sebagai lokasi yang akan dijadikan studi kasus. Objek wisata ini masih sangat perlu mendapat dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan, guna memberikan kenyamanan bagi para pengunjungnya. Pengelolaan dilakukan secara profesional sehingga menghasilkan pendapatan bagi pengembangan daya tarik wisata yang berkelanjutan, sehingga masyarakat sekitar dapat merasakan pentingnya kegiatan usaha pariwisata. Pantai Gonda juga telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah bahwa desa Gonda merupakan Desa Wisata, dengan pengakuan tersebut desa ini sudah memiliki potensi yang sangat mendukung dalam pengembangannya. Objek wisata pantai Gonda terlihat pada gambar 2 berikut.



Gambar 2. Dokumentasi Wisata Pantai Gonda

Terkait kerjasama dengan pengelola destinasi dan lembaga *upgrade* komunikasi dengan wisatawan luar Negeri, belum terjalin kerjasama yang baik. Sehingga lembaga kursus tidak mendapatkan jumlah peserta yang bekerja di destinasi pariwisata di Kabupaten Polewali Mandar. Perlunya kompetensi *upgrade* komunikasi dengan wisatawan luar Negeri untuk sumber daya pariwisata di Kabupaten Polewali Mandar karena belum mendapat perhatian yang begitu tinggi, sedangkan kunjungan wisatawan mancanegara bergantung pada penyelenggaraan *International Event* yang diadakan setahun sekali, sehingga wisatawan yang sering dilayani umumnya hanya wisatawan domestik. Jadi mereka tidak merasa penting untuk memperoleh keterampilan *upgrade* komunikasi dengan wisatawan luar Negeri.

Dinas pendidikan memberikan kesempatan waktu kegiatan di luar sekolah bagi siswa, sehingga siswa memiliki kesempatan untuk mengikuti kegiatan pelatihan *upgrade* komunikasi dengan wisatawan luar Negeri di luar sekolah, Misalnya pada saat bulan ramadhan tiba, siswa diberi kesempatan mengikuti kegiatan pengembangan diri di luar sekolah. Mengenai kerjasama antara lembaga kursus dengan pihak pengelola daya tarik wisata juga sangat perlu dijalin, terutama mengenai program kursus yang diprogramkan dan ditawarkan kepada destinasi, agar pihak destinasi dapat memberikan kesempatan kepada pegawai yang bekerja di tempat tersebut.

Kemampuan sumber daya manusia melalui *upgrade* komunikasi dengan wisatawan luar Negeri untuk narasumber pariwisata yang bertugas di masing-masing destinasi, sehingga mereka dapat berkomunikasi ketika berhadapan dengan tamu asing yang berkunjung ke destinasi mereka. Begitu juga agar sumber daya pariwisata dapat meningkatkan karir mereka di bidang pariwisata. Baik nasional maupun internasional. Sumber daya manusia tidak hanya terus bekerja di daerah asalnya tetapi mereka juga memiliki kesempatan untuk berkarir di luar daerahnya. Supaya generasi muda termotivasi untuk meningkatkan kompetensinya dalam komunikasi dengan wisatawan luar Negeri, setelah melihat keberhasilan seseorang hasil dari kemampuan komunikasi dengan wisatawan luar Negeri yang baik.

Hasil wawancara dengan ketua Pokdarwis dengan didirikannya desa wisata di Desa Gonda, tetap berharap mempertahankan kehidupan masyarakat yang masih asli, meskipun telah mendapatkan beberapa tawaran untuk memberikan bantuan berupa akses internet di seluruh kawasan Pantai Gonda, telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan dari pengelolaan pantai ini adalah untuk menjaga kelestarian pantai karena masyarakat sering melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan-bahan yang dapat merusak kehidupan biota laut. Objek wisata ini sering dikunjungi oleh wisatawan mancanegara seperti Jepang, narasumber yang bertugas di lokasi ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi komunikasi dengan wisatawan luar Negeri. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama dengan Lembaga Kursus *upgrade* komunikasi dengan wisatawan luar Negeri. Salah satu lembaga kursus ternama adalah Lembaga Kursus Duta Asia, berikut foto saat wawancara.



Gambar 3. Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Kurus SDM Lembaga Duta Asia

Hasil wawancara dengan LPK Duta Asia Kecamatan Wonomulyo disebutkan bahwa pihaknya setiap tahun mendapatkan bantuan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu, agar mereka dapat mengikuti pelatihan di *Asian Ambassador Course Institute* guna memperoleh keahlian khusus yang akan digunakan sebagai bekal membuka usaha di Kabupaten Polewali Mandar. Terkait kerjasama dengan Dinas Pendidikan, lembaga kursus harus melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar bahwa mereka telah menerima dana bantuan pendidikan dari Dinas Pendidikan Pusat dan akan digunakan untuk membina siswa yang kurang mampu. Keterlibatan lembaga kursus duta Asia ini, tentunya sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Polewali Mandar kedepannya akan mengurangi pengangguran, dan akan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk membuka usaha sendiri. Selain lembaga kursus, Dinas Pendidikan setempat berperan penting dalam meningkatkan keterampilan sumber daya manusia, oleh karena itu berikut akan dibahas kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar.

Hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan belum menjalin kerjasama dengan dinas pariwisata dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui *upgrade* komunikasi dengan wisatawan luar Negeri karena masing-masing instansi pemerintah memiliki program kerja yang kegiatannya tidak terkait dengan instansi lain, melainkan dalam melaksanakan kegiatan yang masih bersifat internal, seperti hubungan dinas provinsi dan kabupaten dalam menjalankan kegiatan, seringkali melibatkan peserta untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas provinsi.

Upaya mengantisipasi sumber daya wisata ketika diadakan kegiatan Internasional, maka pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar memberikan penawaran kepada narasumber yang telah memiliki sertifikat kompetensi bahasa asing untuk mendaftar menjadi pemandu wisata pada kegiatan tersebut. Jika tidak ada kegiatan internasional, maka pelaksanaan rekrutmen dan pelatihan *upgrade* komunikasi dengan wisatawan luar Negeri tidak akan diadakan. Berdasarkan hasil penelitian di atas, baik dari wawancara maupun observasi, menunjukkan bahwa manajemen destinasi dan kursus *upgrade* komunikasi dengan wisatawan luar Negeri tidak maksimal.

Keterlibatan berbagai pihak yang berkepentingan membuat rencana kerjasama yang akan dilaksanakan untuk waktu tertentu. Kerjasama untuk meningkatkan kompetensi *upgrade* komunikasi dengan wisatawan luar Negeri bagi sumber daya manusia, serta mengelola destinasi wisata menjadi daya tarik wisata yang berkelanjutan dengan pengelolaan yang profesional.

Pembahasan

Kerjasama antar instansi yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia pariwisata belum terjalin dengan baik, seperti antara Dinas Pariwisata dengan Dinas Pendidikan, namun dalam menangani sumber daya yang memiliki kompetensi komunikasi dengan wisatawan luar Negeri, dinas pariwisata langsung membuka penawaran secara terbuka terhadap sumber daya yang kompeten karena adanya *event* Internasional tahunan seperti FIPAP yang diikuti oleh beberapa negara untuk memperkenalkan budaya. Keberadaan wisatawan asing menjadikan perlunya belajar komunikasi dengan baik (Suryana, 2018).

Pemerintah juga telah menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan kemampuan komunikasi dengan wisatawan luar Negeri. Jika ada permintaan peserta dari Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat untuk mengirimkan petugas destinasi untuk kegiatan pelatihan terkait pengembangan kompetensi komunikasi dengan wisatawan luar Negeri, dinas pariwisata kabupaten Polewali Mandar segera menginformasikan kepada masing-masing destinasi untuk menunjuk karyawannya untuk mengikuti pelatihan. Kesigapan pemerintah dalam meningkatkan sumber daya pelaku wisata menjadi hal positif dalam kelangsungan wisata tersebut (Nieamah, Utami, Fiddienika, Purwoko, & Pramugara, 2018).

Kerjasama masih bersifat internal di lingkungan Dinas Pariwisata setempat. Dinas Pendidikan memiliki peran dalam memajukan kompetensi sumber daya manusia karena mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan sekolah di suatu daerah, baik sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan. Perizinan dalam pendirian semua lembaga kursus yang didirikan di suatu daerah harus melalui dinas pendidikan kabupaten dan provinsi. Pendidikan formal dan non formal memiliki peran penting dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia karena lembaga ini dapat menentukan kebijakan termasuk kompetensi komunikasi dengan wisatawan luar Negeri bagi sumber daya manusia (Hidayati, 2012).

Penyelenggara Kursus *upgrade* komunikasi dengan wisatawan luar Negeri di Kampung Kanang menunjukkan peserta pelatihan meningkat selama liburan bulan puasa. Di dalam beberapa tahun terakhir, hari libur selama bulan puasa relatif sedikit, sehingga jumlah peserta pelatihan agak memenuhi. Masa Pandemi Covid 19, kegiatan kursus ditutup total. Upaya mendukung rencana lembaga kursus diperlukan dukungan dari dinas pendidikan, agar generasi muda yang memiliki bakat untuk mengembangkan diri dalam meningkatkan kompetensi *upgrade* komunikasi dengan wisatawan luar Negeri dapat diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya. Kemampuan komunikasi penting untuk pelaku wisata (Suryana, 2018).



Kerjasama dengan pengelola destinasi sudah terjalin dengan baik, dinas pariwisata langsung menghubungi pengelola destinasi jika ada permintaan peserta pelatihan *upgrade* komunikasi dengan wisatawan luar Negeri jika ada permintaan dari dinas pariwisata Provinsi Sulawesi Barat. Belum ada kerjasama dengan lembaga kursus dan masyarakat lokal yang ingin meningkatkan kompetensi, mereka langsung menghubungi lembaga kursus jika masyarakat ingin meningkatkan kompetensi tanpa ada rekomendasi dari dinas pariwisata setempat. Dinas Pendidikan belum menjalin kerjasama dengan dinas pariwisata dalam peningkatan kompetensi sumber daya pariwisata. Kerjasama antar Lembaga menjadi penting untuk keberhasilan wisata (Nandang & Mulyanie, 2018).

Perihal pemberian izin penyelenggaraan kursus bisnis baik *upgrade* komunikasi dengan wisatawan luar Negeri maupun bidang studi keterampilan lainnya, terlebih dahulu harus mendapat pengakuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Dinas Pendidikan berperan dalam menentukan kebijakan terkait penyelenggaraan kegiatan pelatihan *upgrade* komunikasi dengan wisatawan luar Negeri di SMA dan SMA dalam rangka meningkatkan minat dan kompetensi *upgrade* komunikasi dengan wisatawan luar Negeri bagi siswa dan siswi di Kabupaten Polewali Mandar. Siswa siswi tersebut menjadi sumber daya pariwisata yang akan bekerja di sektor pariwisata. Sumber daya manusia yang unggul menjadikan wisata berjalan dengan lancar (Nursetiawan & Garis, 2019)

Pelaksanaan pembelajaran *upgrade* komunikasi dengan wisatawan luar Negeri di sekolah akan terlaksana dengan baik jika ada kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat, karena pihak inilah yang menentukan teknis penyelenggaraan pendidikan di masing-masing sekolah. Jika penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bahasa Inggris memiliki peluang bagi siswa, maka sumber daya manusia tertarik untuk meningkatkan kompetensinya. Kerjasama dengan lembaga penyelenggara kursus juga harus terjalin dengan baik, tidak hanya pada saat meminta izin pendirian lembaga kursus, tetapi juga kerjasama harus selalu terjalin dalam proses penyampaian kursus agar lembaga lain dapat berjalan dengan baik, terorganisir, dengan jumlah peserta meningkat secara signifikan dan berkelanjutan. Kursus dapat meningkatkan skill, sikap, dan pengetahuan (Sukariasih, Saputra, Ikhsan, Sejati, & Nisa, 2019).

Kerjasama dalam rangka gotong royong antar instansi pemerintah harus mulai dilaksanakan dengan menerapkan konsep kerjasama yang sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Konsep kerjasama adalah sebagai berikut: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, proses kolaborasi. Proses kolaborasi, dalam hal ini kolaborasi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: dialog tatap muka, dalam hal ini negosiasi dengan itikad baik. Bagaimana membangun kepercayaan antar peserta kolaborasi, bagaimana membangun komitmen dalam proses kolaborasi, berbagi pemahaman misi dan masalah yang dihadapi, dan mengidentifikasi nilai-nilai bersama dalam kolaborasi, hasil antara, dengan melihat bagaimana mencapai kesuksesan awal, melakukan perencanaan strategis, dan

menemukan fakta bersama. Dialog menjadi pembuka dalam membangun kepercayaan (Nopriono & Suswanta, 2019).

Kesimpulan

Kerjasama pemerintah yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dalam hal *upgrade* komunikasi dengan wisatawan luar Negeri dengan instansi lainnya belum terjalin dengan baik. Dinas Pariwisata sebagai instansi yang penting dalam hal peningkatan sumber daya manusia belum bekerjasama dengan instansi penting lainnya yaitu Dinas Pendidikan. Upaya pemerintah melalui Dinas Pariwisata hanya menunggu adanya pelatihan dari Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat. Kerjasama juga belum dibentuk dengan lembaga kursus dan masyarakat lokal yang ingin meningkatkan kompetensi komunikasi dengan wisatawan luar Negeri.

Daftar Pustaka

- Amaluddin, L. O., Sejati, A. E., Ihsan, F. A., & Mutiana, M. (2019). Identification of Huntete beach tourism object in Kulati village East Tomia sub-district Wakatobi regency. *Geosfera Indonesia*, 3(3), 43–49. Retrieved 30 October 2019 from <https://doi.org/10.19184/geosi.v3i3.8688>
- Anggarini, D. T. (2021). Upaya Pemulihan Industri Pariwisata dalam Situasi Pandemi Covid-19. *Jurnal Pariwisata*, 8(1), 22–31. Retrieved 21 September 2021 from <https://doi.org/10.31294/PAR.V8I1.9809>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. Retrieved 18 January 2023 from <https://doi.org/10.1093/JOPART/MUM032>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. Retrieved 18 January 2023 from <https://doi.org/10.1093/JOPART/MUR011>
- Fitriana, R., Tarunajaya, W. B., & Akbar, K. (2021). Pelatihan Protokol Kesehatan Bagi Pemandu Wisata Pedesaan di Kabupaten Belitung. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 608–616. Retrieved 22 September 2021 from <https://doi.org/10.31849/DINAMISIA.V5I3.5395>
- Hidayati, D. (2012). *Aktivitas Waktu Luang (Leisure) Anak Jalanan di Sekitar Simpang Lima Kota Semarang (Studi Anak Jalanan Binaan Yayasan Setara)*. *Journal of Non Formal Education and Community Empowerment* (Vol. 1). Retrieved 8 November 2020 from <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc>
- HL, N. I., Nasruddin, N., & Sejati, A. E. (2022). *Metodologi Penelitian dan Pembelajaran*. (S. Sarmadan, Ed.). Yogyakarta: Deepublish. Retrieved from https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=ACCyqpUAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=ACCyqpUAAAAJ:r0BpntZqJG4C
- Ismail, M. (2020). Strategi Pengembangan Pariwisata Provinsi Papua. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 4(1), 59–69. Retrieved 21 September 2021 from <https://doi.org/10.21787/MP.4.1.2020.59-69>
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nandang, H., & Mulyanie, E. (2018). Analisis Potensi Pariwisata Air Terjun di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan Dan Profesi*

- Kegeografian*, 15(1), 37–44. Retrieved 4 November 2020 from <https://doi.org/10.15294/jg.v15i1.15274>
- Nieamah, K. F., Utami, N., Fiddienika, A., Purwoko, Y., & Pramugara, D. P. (2018). Strategi Pengembangan Desa Ekowisata Pampang untuk Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan. *Khasanah Ilmu - Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 9(2), 81–87. Retrieved 21 September 2021 from <https://doi.org/10.31294/KHI.V9I2.5231>
- Nopriyono, & Suswanta. (2019). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Collaborative Governance (Studi Kasus Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten kulon Progo). *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 1(1), 21–36. Retrieved 17 January 2023 from <https://doi.org/10.18196/JPK.V1I1.7799>
- Nursetiawan, I., & Garis, R. R. (2019). *Identifikasi Potensi Desa Wisata di Kabupaten Ciamis Berbasis Community Based Tourism*. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* (Vol. 6). Retrieved 4 November 2020 from Bulan Desember Tahun: 10.25157/DINAMIKA.V6I4.3071
- Rifa'i, M. (2021). Pengembangan Strategi Komunikasi Pemasaran Pokdarwis Desa Jurug dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan (Studi Kasus di Desa Wisata Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo). *JURNAL HERITAGE*, 9(1), 20–35. Retrieved 21 September 2021 from <https://doi.org/10.35891/HERITAGE.V9I1.2570>
- Saputra, N., Yuliana, Y., & Ferdian, F. (2021). PENGARUH DAYA TARIK WISATA TERHADAP KEPUTUSAN BERKUNJUNG DI OBJEK WISATA PANTAI AIR MANIS PADANG. *Journal of Home Economics and Tourism*, 15(2). Retrieved 17 January 2023 from <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jhet/article/view/10643>
- Shergold, P. (2008). Governing through collaboration. *Collaborative Governance*. Retrieved 18 January 2023 from <https://doi.org/10.22459/CG.12.2008.02>
- Sukariasih, L., Saputra, I. G. P. E., Ikhsan, F. A., Sejati, A. E., & Nisa, K. (2019). Improving the learning outcomes of knowledge and inquiry skill domain on third grade students of smp negeri 14 Kendari through the guided inquiry learning model assisted by science kit. *Geosfera Indonesia*, 4(2), 175–187. Retrieved 30 October 2019 from <https://doi.org/10.19184/geosi.v4i2.10097>
- Sumarmi, S., Arinta, D., Suprianto, A., & Aliman, M. (2021). The development of ecotourism with Community-Based Tourism (CBT) in Clungup Mangrove Conservation (CMC) of tiga warna beach for sustainable conservation. *Folia Geographica*, 63(1), 123–142.
- Suryana. (2018). Fasilitas Pendukung Daya Tarik Wisata Kuliner Seputar Cikapundung River Spot, Kota Bandung. *Jurnal Pariwisata*, 5(3), 165–174. Retrieved 22 September 2021 from <https://doi.org/10.31294/PAR.V5I3.4379>
- Umar, A., Burhanuddin, & Nasrulhaq. (2019). Kolaborasi Aktor dalam Pembangunan Pariwisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(1), 57–66. Retrieved 17 January 2023 from <https://doi.org/10.21787/MP.3.1.2019.57-66>
- Zaenuri, M. (2021). NEW MODEL FOR LOCAL POST DISASTER TOURISM GOVERNANCE: Evidence from Indonesia's Merapi Volcano. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 25(2), 185–213. Retrieved 17 January 2023 from <https://doi.org/10.22146/JKAP.63993>